

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahab (2005). Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT Bumi Aksara

Agustino, Leo (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Antonius Tarigan, Dkk (2008) Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukuran. Universitas Pepabari Makassar.

B. Jurnal

Nona Widayana. 2021. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Jalur Zonasi.

Erni Saharuddin, dkk. 2020. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat SMA Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Puji Suryanti. 2020. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Serta Pengaruhnya Terhadap Upaya Manajemen Mutu Pendidikan Berdasarkan Asas Keadilan Di SMA Negeri Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2016-2018.

Eni Syfitri. 2021. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Di SMAN 1 Kamal.

Candra Wijaya, dkk. 2020. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Langkat.

Amatulloh Qonita & ST Nurjaningsih. 2019. Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi.

Anisa, dkk. 2020. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

Bambang Suteng Sulasmono & Charatina Sitoresmi Triniwiastuti. 2020. Evaluasi Program Ppdb Berbasis Zonasi Di Smp Negeri 2 Pabelan Kabupaten Semarang.

Ahmad Mashudi. 2019. Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK Dalam Mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia Di Jawa Timur.

Ananta Prathama & Widhi Bagajadti. 2019. Implementasi Kebijakan Penetapan Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri Di Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sidoarjo (Kabupaten Sidoarjo-Kota Surabaya).

C. WEBSITE/INTRNET

- Ppdb.disdik.Jabar.go.id
-

D. PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 5 Ayat 1 yang berisi tentang setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah ke atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Ayat .
- Undang-Undang 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang fungsi-fungsi pemerintah daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 1, pasal 1 Ayat 2, pasal 1 Ayat 3 tentang pengertian pemerintah daerah